

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

Nenda Marliani

Program Studi Akuntansi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STAN IM, Jl. Belitung No.7 Bandung

Email: nendamarliani@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung berdasarkan hasil perhitungan rasio-rasio keuangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan realisasi anggaran. Teknik analisis data yang digunakan statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah berada pada kriteria rendah dengan pola hubungan konsultatif. Rata-rata rasio derajat desentralisasi berada pada kriteria kurang. Rata-rata rasio efektivitas PAD sudah sangat efektif. Rata-rata rasio efisiensi belanja sudah termasuk kategori efisien.

Kata Kunci: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Belanja.

ABSTRACT

This study aims to determine the financial performance of the Bandung Regency Government based on the results of the calculation of financial ratios. The research method used is descriptive method. The data used is secondary data in the form of a budget realization report. The data analysis technique used was descriptive statistics. The results showed that the average regional financial independence ratio was in the low criteria with a consultative relationship pattern. The average ratio of degrees of decentralization is in the less criteria. The average PAD effectiveness ratio is already very effective. The average spending efficiency ratio is included in the efficient category.

Keywords: *Regional Financial Independence Ratio, Decentralization Degree Ratio, PAD Effectiveness Ratio, Expenditure Efficiency Ratio.*

1. PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan salah satu indikator demi terwujudnya pembangunan nasional. Pemerintah memberi kewenangan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri (*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*). Pemerintah daerah sebagai daerah otonom seharusnya mampu membiayai kebutuhan daerahnya dan tidak tergantung pada pemerintah pusat. Masalah yang sulit dihadapi oleh mayoritas pemerintah daerah adalah masih kecilnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah serta masih tergantungnya daerah terhadap dana transfer dari

pemerintah pusat (Sofi, 2021). Otonomi daerah mengharapkan setiap pemerintah daerah memiliki kemandirian yang lebih besar dalam keuangan daerah yang berdampak pada peningkatan kinerja keuangan daerah (Harjito, Nugraha, & Yulianto, 2020).

Dari aspek teori keagenan. Pemerintah daerah merupakan agen, sedangkan rakyat yang diwakili oleh DPRD adalah prinsipal (Halim & Kusufi, 2014). Pemerintah daerah sebagai agen mempunyai kewajiban untuk melaporkan pertanggungjawab keuangan daerah (*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*). Laporan tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam penilaian kinerja keuangan daerah. Kinerja keuangan merupakan tingkat pencapaian suatu target kegiatan keuangan pemerintah daerah yang diukur melalui indikator-indikator keuangan yang dapat dinilai dari hasil pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Sijabat, 2014). Dengan menilai kinerja pemerintahan melalui laporan keuangan, masyarakat mendapatkan data-data yang objektif serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Faktor kinerja keuangan menjadi faktor penting yang perlu mendapat perhatian serius dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pengukuran kinerja akan memberikan umpan balik atas rencana yang telah diimplementasikan (Dwi Saraswati, Yunita Sari Rioni, 2019). Pengukuran kinerja keuangan dapat digunakan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah daerah. Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembandingan skema dan pelaksanaannya (Saragih & Siregar, 2020). Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan analisis laporan keuangan.

Terdapat beberapa teknik yang dapat dilakukan dalam menganalisis laporan keuangan. Salah satu teknik yang paling banyak digunakan adalah analisis rasio keuangan (Mahmudi, 2019). Rasio keuangan merupakan angka yang dihasilkan dari perbandingan antara suatu pos di dalam laporan keuangan dengan pos lainnya (Awani & Hariani, 2021). Rasio keuangan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi, rasio efektivitas pendapatan asli daerah, dan rasio efisiensi belanja.

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Halim & Kusufi, 2014). Rasio kemandirian keuangan daerah

dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah (Mahmudi, 2019).

Rasio derajat desentralisasi adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembanguna (Maulina & Rhea, 2019). Rasio derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah (Mahmudi, 2019).

Rasio Efektivitas PAD digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang sudah direncanakan (Oktrivina, Siregar, & Mariana, 2020). Rasio efektivitas pendapatan asli daerah dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dengan target penerimaan pendapatan asli daerah (dianggarkan) (Mahmudi, 2019).

Kinerja pemerintah dianggap baik jika pemerintah daerah mampu melakukan efisiensi belanja. Misalnya saja berdasarkan laporan realisasi anggaran, realisasi belanja adalah sebesar 95% dari jumlah yang dianggarkan. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi belanja 5%. Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja (Mahmudi, 2019).

Beberapa penelitian mengenai kinerja keuangan daerah telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Hasil penelitian (Susanto, 2019) menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram tahun 2012-2015 rasio efektifitas dikategorikan efektif, rasio efisiensi dikategorikan tidak efisien, rasio kemandirian pengelolaan keuangan daerah masih rendah. Penelitian yang dilakukan oleh (Mailangkay et al, 2020) menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah Kota Bitung tahun 2015-2019 masih rendah dan masih bergantung kepada pemerintah pusat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Rahmayanti, 2016) menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo masih belum optimal, karena tingkat kemandirian daerah masih sangat rendah.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung untuk tahun 2016-2020 berdasarkan hasil perhitungan rasio keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan

Pemerintah Kabupaten Bandung berdasarkan hasil perhitungan rasio-rasio keuangan tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Objek dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan. Subjek pada penelitian ini adalah laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2016-2020. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung tahun 2016-2020 yang diperoleh dari *website* resmi Pemerintah Kabupaten Bandung yaitu <https://ppid.bandungkab.go.id/> dan <http://bkad.bandungkab.go.id/>. Teknik pengumpulan data yang digunakan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan teknik statistik deskriptif. Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2018).

Analisis data menggunakan rasio keuangan dengan rumus sebagai berikut.

a) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Transfer Pemerintah Pusat + Provinsi + Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 1. Kriteria Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian (%)	Tingkat Kemandirian	Pola Hubungan
0% - 25%	Rendah Sekali	Instruktif
>25% - 50%	Rendah	Konsultatif
>50% - 75%	Sedang	Partisipatif
>75% - 100%	Tinggi	Delegatif

Sumber:(Maulina & Rhea, 2019)

b) Rasio Derajat Desentralisasi

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2. Kriteria Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio Derajat Desentralisasi (%)	Kriteria Derajat Desentralisasi
0,00-10,00	Sangat Kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: (Maulina & Rhea, 2019)

c) Rasio Efektivitas PAD

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 3. Kriteria Rasio Efektivitas PAD

Nilai Rasio Efektivitas PAD (%)	Kriteria
Di atas 100	Sangat Efektif
100	Efektif
90 – 99	Cukup Efektif
75 – 89	Kurang Efektif
Di bawah 75	Tidak Efektif

Sumber: (Mahmudi, 2019)

d) Rasio Efisiensi Belanja

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Terjadi efisiensi belanja jika realisasi belanja kurang dari 100% (Mahmudi, 2019).

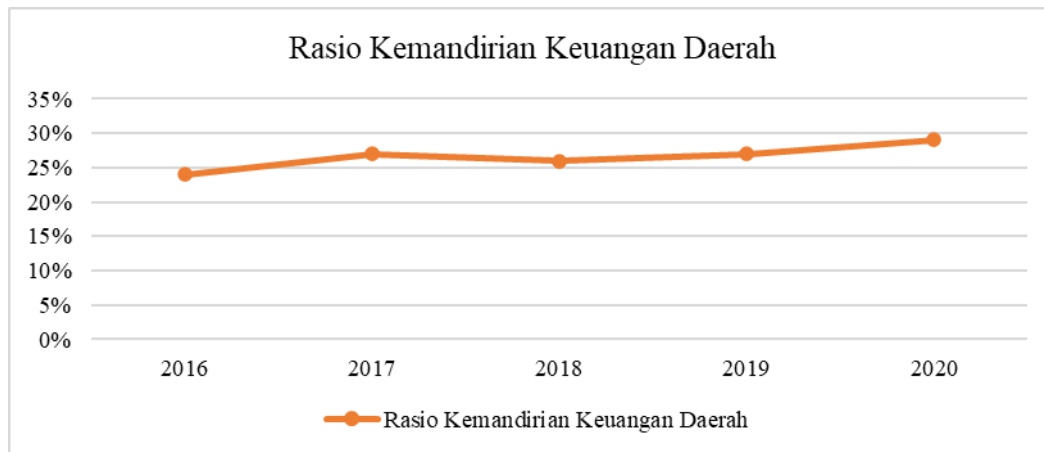
3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel 4. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

Tahun	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Kriteria Kemandirian	Pola Hubungan
2016	24%	Rendah sekali	Instruktif
2017	27%	Rendah	Konsultatif
2018	26%	Rendah	Konsultatif
2019	27%	Rendah	Konsultatif
2020	29%	Rendah	Konsultatif
Rata-Rata	27%	Rendah	Konsultatif

Sumber: Data Sekunder, diolah (2022)



Gambar 1: Grafik Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

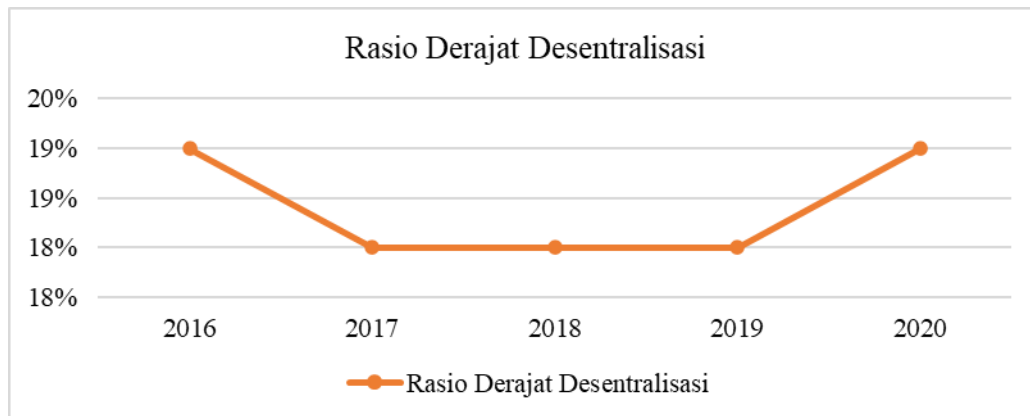
Berdasarkan tabel 4 dan gambar 1 rasio kemandirian keuangan daerah mengalami fluktuasi. Nilai rasio tahun 2016 adalah 24%, nilai tersebut menunjukkan bahwa kriteria kemandirian tergolong rendah sekali. Pola hubungan yang terjadi adalah instruktif yang menunjukkan bahwa peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Pada tahun 2017-2020 nilai rasio memiliki kriteria kemandirian rendah. Pola hubungan yang terjadi konsultatif berarti campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah. Rata-rata nilai rasio 27% sehingga kriteria kemandirian rendah, pola hubungan yang terjadi adalah konsultatif.

Rasio Derajat Desentralisasi

Tabel 5. Rasio Derajat Desentralisasi
Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

Tahun	Rasio Derajat Desentralisasi	Kriteria
2016	19%	Kurang
2017	18%	Kurang
2018	18%	Kurang
2019	18%	Kurang
2020	19%	Kurang
Rata-Rata	18%	Kurang

Sumber: Data Sekunder, diolah (2022)



Gambar 2: Grafik Rasio Derajat Desentralisasi

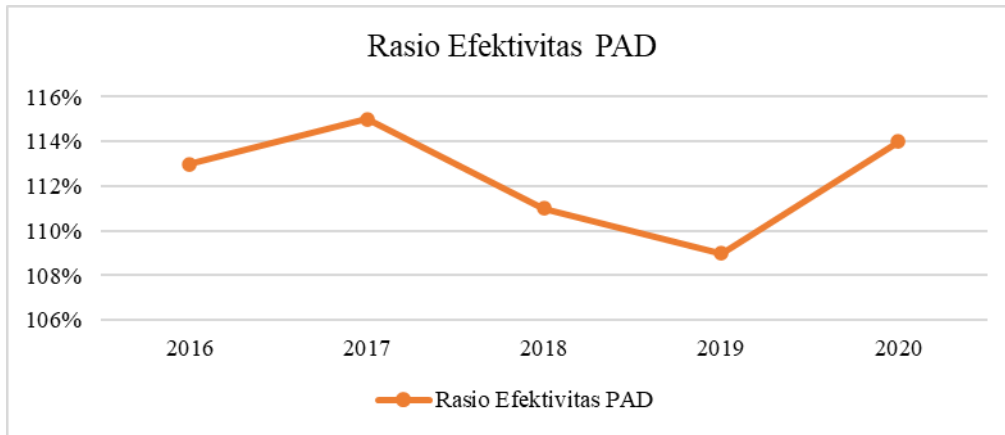
Berdasarkan tabel 5 dan gambar 2, rasio derajat desentralisasi mengalami penurunan di tahun 2017 dan nilainya sama sampai dengan tahun 2019 serta naik kembali nilainya di tahun 2020. Peningkatan dalam rasio di tahun 2020 menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Bandung telah berupaya untuk meningkatkan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai rasio berada pada kriteria kurang dalam tahun 2016-2020 begitupun secara rata-rata, nilainya berada pada kategori kurang. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah masih kurang.

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Tabel 6. Rasio Efektivitas PAD
Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

Tahun	Rasio Efektivitas PAD	Kriteria
2016	113%	Sangat Efektif
2017	115%	Sangat Efektif
2018	111%	Sangat Efektif
2019	109%	Sangat Efektif
2020	114%	Sangat Efektif
Rata-Rata	112%	Sangat Efektif

Sumber: Data Sekunder, diolah (2022)



Gambar 3: Grafik Rasio Efektivitas PAD

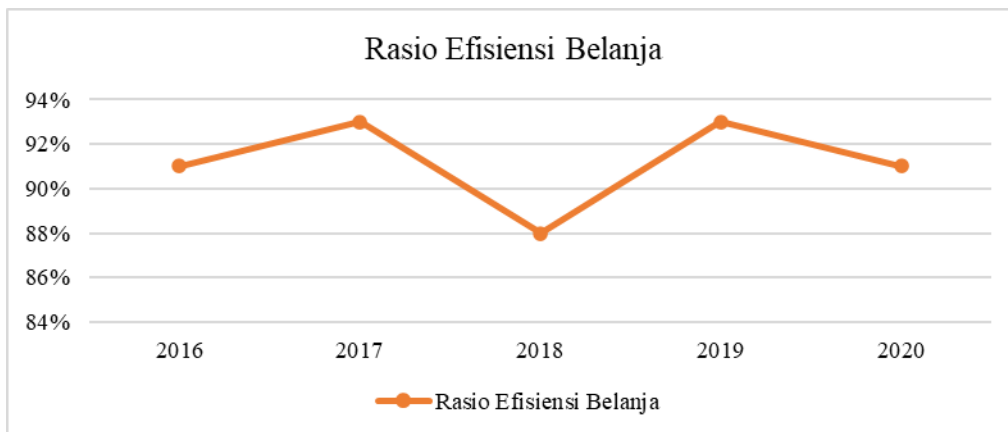
Data pada tabel 6 dan grafik 3 menunjukkan bahwa rasio efektivitas PAD dari tahun 2016 sampai 2020 berada pada kriteria sangat efektif, karena nilainya lebih dari 100%. Sehingga menunjukkan bahwa pemerintah daerah sudah sangat efektif dalam merealisasikan target penerimaan pendapatan asli daerah.

Rasio Efisiensi Belanja

Tabel 7. Rasio Efisiensi Belanja
Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

Tahun	Rasio Efisiensi Belanja	Kriteria
2016	91%	Efisien
2017	93%	Efisien
2018	88%	Efisien
2019	93%	Efisien
2020	91%	Efisien
Rata-Rata	91%	Efisien

Sumber: Data Sekunder, diolah (2022)



Gambar 4: Grafik Rasio Efisiensi Belanja

Hasil perhitungan pada tabel 7 dan gambar 4 menunjukkan bahwa rasio efisiensi belanja mengalami fluktuasi. Namun secara keseluruhan dan nilai rata-rata, nilai rasio tersebut dibawah 100%. Berarti pemerintah Kabupaten Bandung sudah melakukan efisiensi anggaran belanja selama tahun 2016-2020.

4. SIMPULAN

Kinerja keuangan Kabupaten Bandung tahun 2016 sampai 2020 berdasarkan hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah berada pada kriteria rendah dengan pola hubungan konsultatif. Rasio derajat desentralisasi termasuk kategori kurang sehingga kontribusi PAD terhadap total pendapatan masih kurang. Rasio efektivitas PAD tergolong sangat efektif. Rasio efisiensi belanja tergolong sudah efisien.

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka saran yang diberikan oleh penulis adalah: (1) untuk meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerah maka Pemerintah Kabupaten Bandung harus berusaha untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah, (2) Untuk meningkatkan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah, disarankan untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dengan identifikasi potensi wajib pajak dan wajib retribusi secara optimal, (3) Untuk mempertahankan efektivitas PAD maka harus terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan mengenai tingkat pencapaian target pendapatan asli daerah, (4) Untuk mempertahankan efisiensi belanja maka dalam setiap pelaksanaan kegiatan harus memilih belanja yang efisien tapi tujuan tetap tercapai.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Awani, M. F., & Hariani, S. (2021). *Analisa Rasio Kemandirian Daerah dan Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. 3(2), 95–102.
- Dwi Saraswati, Yunita Sari Rioni, S. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 9(2), 110–120.
- Halim, Abdul & Kusufi, M. S. (2014). *Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harjito, Y., Nugraha, P. S., & Yulianto, Y. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Indonesia. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 5(1), 19–28. <https://doi.org/10.29407/jae.v5i1.14061>
- Mahmudi. (2019). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. Yogyakarta: STIM

YKPN.

- Mailangkay, P. P. U., Murni, S., Rate, P. V, Kinerja, A., & Daerah, K. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 8(3), 278–285. <https://doi.org/10.35794/emba.v8i3.29937>
- Maulina, F., & Rhea. (2019). Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat). *Obis*, 2(1), 11–22.
- Oktrivina, A., Siregar, D., & Mariana, I. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan (Studi Kasus: Pemerintahan Kota Depok-Jawa Barat). *Journal IMAGE /*, 9(1), 1–19.
- Rahmayanti, A. (2016). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013*. 1(1), 40–54.
- Saragih, F., & Siregar, I. A. (2020). Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tebing. *Seminar of Social Sciences Engineering & Humaniora*, 1–14.
- Sijabat, M. Y. (2014). ... Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Dan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah *Jurnal Administrasi Publik*, 2(32), 236–242. Retrieved from <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/365>
- Sofi, I. (2021). *Mendorong kemandirian daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah*.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Distribusi - Journal of Management and Business*, 7(1), 81–92. <https://doi.org/10.29303/distribusi.v7i1.67>
- Undang-Undang Nomor 23*. (2014).